

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil temuan sebelumnya, bahwa dari penerapan yang dijalankan CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung dilakukan secara manual dan sederhana dalam mengelola data keuangan yang digunakan guna memperoleh informasi untuk melakukan pembayaran gaji. Dengan hasil tersebut, sependapat dengan teori menurut George H. Boodnar dan William S. Hopwood, bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengelola data keuangan menjadi sebuah sumber informasi akuntansi yang dapat dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi.⁸⁸

Pembayaran gaji karyawan diberikan kepada karyawan tetap pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada karyawan yang berhak menerima gaji dengan pembayaran yang dilakukan setiap tanggal satu bagi karyawan tetap yang sebagai admin dan per minggu untuk tenaga kerja produksi dengan kisaran sesuai dengan penetapan yang belaku. Hal tersebut juga didukung teori dikemukakan oleh Kadarisman dalam buku Manajemen Kompensasi, gaji adalah suatu bentuk imbalan berupa uang yang diterima oleh pegawai atau

3. ⁸⁸ George H. Bodnar dan William S. Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9...* Hal.

karyawan tetap sebuah organisasi atau perusahaan atas jasa yang telah diberikan. Gaji juga dapat dikatakan imbalan tetap yang dibayarkan kepada seorang pegawai atau karyawan pada suatu organisasi.⁸⁹

Pada praktik yang diterapkan pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung terkait dengan sistem informasi akuntansi penggajian masih terdapat kekurangan. Dimana kekurangan tersebut menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan data keuangan terkait pembayaran gaji karyawan. Hal ini berdasarkan temuan penelitian dokumen yang digunakan masih manual dengan catatan sederhana yang artinya dokumen-dokumen yang digunakan belum tercetak dan bernomor bukti serta belum memiliki salinan yang dapat digunakan sebagai arsip jika sewaktu-waktu dibutuhkan seperti daftar hadir karyawan yang masih belum memadai menimbulkan kesalahan perhitungan gaji. Hal ini sependapat dengan teori menurut Ranatariza dan Noor bahwa dokumen bermanfaat dalam penginputan data disertai penomoran supaya dapat dijadikan bukti dan disimpan sesuai dengan urutan yang jelas dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dicari dengan mudah serta memuat rincian data yang jelas untuk proses penginputan.⁹⁰

Adapun beberapa dokumen yang digunakan berupa, daftar kehadiran atau absensi karyawan, daftar gaji, slip gaji, dan amplop gaji. Sementara itu, kelengkapan penggunaan dokumen dalam penerapan sistem

⁸⁹ Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hal. 17.

⁹⁰ Mirza Maulinahardi Ranatariza dan Max Advian Noor, *Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Administrasi Bisnis*, (Malang: UB Press, 2013) Hal. 98.

informasi akuntansi penggajian tersebut bisa dikatakan belum sepenuhnya seusai dengan teori menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi menjelaskan beberapa dokumen yang membantu untuk penggajian karyawan seperti dokumen pendukung perubahan gaji, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, rekap daftar gaji, surat pernyataan gaji, amplop gaji, dan bukti kas keluar.⁹¹

Selain kelengkapan dokumen yang kurang memadai tersebut, pada praktiknya juga sering terjadi kesalahan perhitungan gaji, karena dalam pencatatan absensi tidak dilakukan pencatatan secara rutin setiap hari, melainkan direkap satu minggu sekali yang dicatat secara manual dan sederhana. Pencatatan daftar gaji juga dilakukan secara manual dan sederhana pada buku catatan berisikan nama karyawan, jumlah absensi dan total gaji yang diterima yang dimasukkan ke dalam amplop gaji. Selain itu, belum memiliki dokumen yang memadai terkait bukti telah melakukan pembayaran gaji (surat pernyataan gaji) yang sebenarnya sangat penting dalam bukti pembayaran gaji karyawan.

Hasil penelitian mendukung secara konsisten penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yurmaini dkk⁹² terkait analisis efektivitas sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Al-Washliyah Medan. Hasil penelitian bahwa efektivitas sistem

⁹¹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi 4*...Hal. 310.

⁹²Yurmaini dkk, "Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Al-Washliyah Medan", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. IV, No. 2, Juli (2019), Dalam <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/5858>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB. Hal 433-434.

informasi akuntansi penggajian belum berjalan secara efektif dikarenakan belum memiliki dokumen-dokumen yang memadai dan surat pernyataan gaji yang berisikan rincian perhitungan karyawan.

Oleh sebab itu, guna meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antaran bagian yang melibatkan karyawan penerima gaji perlu diperbaiki dengan dokumen yang tercetak dan memiliki kelengkapan nomor bukti pada bagian daftar karyawan yang juga harus rutin dicatat setiap hari dengan melakukan pengawasan serta daftar gaji yang lebih memadai serta memiliki salinan yang dapat membantu perusahaan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pengecekan data. Kemudian sebaiknya perusahaan juga membuat surat pernyataan gaji dan upah yang lebih memadai. Sebagaimana pendapat dari teori menurut Mulyadi, bahwa dokumen surat pernyataan gaji dan upah berisikan perhitungan gaji maupun potongan yang diterima oleh setiap tenaga kerja.⁹³

Berbicara mengenai data keuangan perusahaan mengandung sebuah informasi yang diperlukan bagi sebuah perusahaan yang dapat ditinjau dari segi pencatatannya. Pada praktiknya pencatatan yang diterapkan pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung secara manual dan sederhana yang artinya perusahaan melakukan pencatatan rutin terhadap pengeluaran kas dan penerimaan kas yang dilakukan secara terpisah akan tetapi dalam pencatatannya menerapkan prinsip kehati-hatian dan kejelasan supaya perusahaan mengetahui total penerimaan kas dan

⁹³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi 6....*, Hal 313.

pengeluaran kas. Namun, dalam hal ini perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan teori menurut Mulyadi bahwa Catatan sistem informasi akuntansi penggajian yang digunakan untuk kelengkapan serta membantu dalam mengelola data, yakni jurnal umum, kartu harga pokok produk, kartu biaya, dan kartu penghasilan karyawan.⁹⁴

Perusahaan hanya sebatas melakukan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas saja belum melakukan pencatatan secara rinci. Penetapan gaji karyawan disesuaikan berdasarkan penetapan ketentuan perusahaan sendiri. Kemudian perusahaan juga belum melakukan catatan pada kartu penghasilan karyawan karena perusahaan masih menggunakan catatan sederhana berupa rincian gaji yang diterima. Oleh sebab itu, perusahaan harus menyajikan catatan supaya lebih jelas sesuai dengan standar umum yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan, supaya dengan pencatatan yang jelas baik dan benar dapat membantu perusahaan dalam melakukan pelaporan informasi keuangan.

Hasil temuan tersebut mendukung secara konsisten penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilliadi⁹⁵ mengenai analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya pengendalian internal pada karyawan outsourcing, yang menunjukkan bahwa catatan yang

⁹⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi 4*...Hal. 317.

⁹⁵ Teddy Aprilliadi, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan dalam Upaya Pengendalian Internal pada Karyawan Outsourcing", *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, Vol. 2, No.1, April (2019), Dalam <https://journal.ummat.ac.id/index.php/pendekar/article/view/2834>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2022 Pukul 06.00 WIB. Hal. 6-7

dilakukan bisa dikatakan kurang lengkap hal ini dikarenakan tidak adanya dokumen jurnal umum, kartu harga pokok produk, dan kartu biaya.

Berdasarkan temuan penelitian salah satunya dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengelolaan data antara pencatatan absen kehadiran, daftar gaji, sampai dengan pembayaran gaji dilakukan oleh fungsi bagian gaji dan upah yang juga memiliki tugas pada bagian kepala produksi batik cap. Kemudian dalam pencairan dan pencatatan pengeluaran untuk pembayaran menjadi tanggungjawab yang dilakukan fungsi keuangan yang juga bertanggungjawab dalam mengelola seluruh keuangan perusahaan dan memegang peran penting dalam perkembangan perusahaan dalam hal ini bagian keuangan merupakan selaku pimpinan perusahaan.

Pemerangkapan tugas yang terjadi di CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung menimbulkan ketidakefektifan dalam menjalankan tanggungjawab kurangnya pengawasan serta menjadi pemicu kesalahan perhitungan penggajian karyawan dikarenakan fokus pekerjaan harus terbagi dengan tanggungjawab lainnya. Hal ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh James A. Hall bahwasannya fungsi-fungsi tugas harus dibagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa adanya pemerangkapan tugas yang menimbulkan praktek yang tidak sehat.⁹⁶ Oleh sebab itu, sebaiknya perusahaan memfokuskan kepada tenaga kerja bagian gaji dan upah saja tidak melakukan pemerangkapan pada tugas lain serta menambah karyawan guna membantu pencatatan akuntansi yang baik dan benar

⁹⁶ James. A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Hal. 192.

maupun pengawasan supaya dapat segera diketahui atau diperbaiki jika terdapat kesalahan maupun risiko.

Penerapan beberapa pihak yang terkait dalam jalannya sistem seperti yang telah diketahui jika terjadi pemerangkapan. Oleh karena itu, bisa dikatakan kurang sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Mulyadi dalam Purba, dalam pemilihan bagian fungsi diharuskan sesuai dengan ketepatan dan tanggungjawab dan kompetensi sumber daya manusia yang berkompeten. Fungsi yang digunakan adalah fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan.⁹⁷

Selanjutnya hasil penelitian mendukung secara konsisten penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwijantara dkk,⁹⁸ mengenai analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan pada pramudi angkutan siswa gratis dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian intern perusahaan pada PT. Damri Cabang Klungkung, yang menunjukkan bahwa belum mendukung pengendalian lantaran di perusahaan tersebut pada praktiknya bisa dikatakan kurang sesuai dengan teori mengenai fungsi-fungsi yang berkaitan, dikarenakan terjadi pemerangkapan tugas dimana hal

⁹⁷ Dimita H.P. Purba, "Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan: Studi Kasus pada Sebuah Rumah Sakit", *Jurnal Manajemen*, Vol. 4, No.1, Januari (2018), Dalam <http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/26>, Diakses pada tanggal 7 Februari 2022 Pukul 21.00 WIB, Hal. 17.

⁹⁸ I Made Manik Dwijantara dkk, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Karyawan pada Pramudi Angkutan Siswa Gratis dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Perusahaan: Studi Kasus Pada PT. Damri Cabang Klungkung", *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, April (2021), Dalam <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1526>, Diakses pada tanggal 7 Februari 2022 Pukul 23.00 WIB, Hal. 113.

terebut menimbulkan ketidakefektifan segi waktu dan dilihat dari kinerja juga tidak bisa optimal sebagaimana mestinya, lantaran harus terbagi dengan tanggungjawab lain yang harus dilakukan secara bersamaan.

Perlu diketahui pula jika sistem dijalankan sesuai prosedur yang dibuat, dalam hal ini beberapa prosedur yang dijalankan yaitu pencatatan daftar hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur permintaan pengeluaran kas, dan prosedur pembayaran gaji yang dijalankan oleh fungsi gaji dan upah dan fungsi keuangan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan perusahaan, akan tetapi pada praktiknya masih terjadi kesalahan dalam melakukan penggajian seperti perhitungan maupun catatan dan dokumen yang belum memadai serta ditambah lagi dengan fungsi yang bertugas melakukan pemerangkapan jabatan yang diakui dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam menyelesaikan tugas maupun pengendalian. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan tugas maupun penambahan karyawan agar dapat dijalankan dengan optimal sebagaimana menurut teori Mulyadi, prosedur membantu dalam jalannya suatu urutan operasional supaya bisa berjalan dengan maksimal salah satunya prosedur untuk penggajian digunakan untuk membantu dalam mengoptimalkan sistem penggajian karyawan dan meningkatkan pengendalian internal perusahaan.⁹⁹

⁹⁹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi 4...* Hal. 319.

Kemudian dari hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Agatha dkk¹⁰⁰, mengenai analisis sistem informasi akuntansi atas penggajian dan pengupahan pada PT. Batik Arjuna Cemerlang Sukoharjo yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan SIA penggajian dan pengupahan sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan perusahaan, meskipun kinerjanya ditemui kekurangan lantaran masih terjadi pemerangkapan tugas serta dilain hal itu sistem yang dilakukan secara keseluruhan masih jalankan secara manual.

B. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pengupahan pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung dapat dikatakan masih sederhana. Meskipun pencatatan masih sederhana dan manual, akan tetapi setiap ada setoran produk dari karyawan diusahakan dicatat dengan baik. Sistem pengupahan diberlakukan kepada tenaga kerja lepas pada bagian pewarnaan, konveksi, dan batik tulis dengan pembayaran sesuai dengan satuan per potong kain yang telah diselesaikan. Hal ini sependapat dengan teori menurut V. Wiratna Sujarweni, upah adalah pembayaran sebagai bentuk balas jasa perusahaan yang diberikan kepada tenaga kerja yang memberikan kontribusi tenaga maupun jasa demi perkembangan

¹⁰⁰ Christina Kurnia Agatha dkk, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi atas Penggajian dan Pengupahan pada PT. Batik Arjuna Cemerlang Sukoharjo", *Jurnal Advande*, Vol. 5, No.2, Desember (2018): 7-19, Dalam <https://www.ejournal.stieaub.ac.id/index.php/advance/article/view/411/399>, Diakses pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 05.07 WIB, Hal 12-13.

perusahaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan, misalnya jumlah unit produksi.¹⁰¹

Namun, permasalahan timbul terkait dengan terjadinya kesalahan perhitungan upah maupun terjadinya ketidaksesuaian pada pembayaran upah masih ada kekurangan, yaitu masih terjadi rangkap jabatan bagian gaji dan upah dan bagian keuangan yang menimbulkan terjadinya kesalahan, hal ini dikarenakan tugas atau tanggungjawab harus dibagi dengan tanggungjawab lainnya yang tentunya juga memakan waktu. Hal ini sependapat dengan teori menurut James A. Hall, bahwa pemisahan fungsi atau tugas yang dijalankan merupakan aktivitas pengendalian internal yang penting dilakukan sehingga tanggungjawab tidak boleh disatukan dengan tanggungjawab lain yang menimbulkan resiko yang tidak diinginkan.¹⁰² Oleh karena itu, penting untuk dilakukannya pemisahan tugas maupun penambahan tenaga kerja supaya tidak terjadi rangkap tugas mengingat jika penyelesaian pengerjaan produk biasanya sewaktu-waktu dilakukan penyetoran sehingga dapat fokus ke satu tanggungjawab dalam pengupaha yang dilaksanakan.

Hasil penelitian ini secara konsisten mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agatha, dkk,¹⁰³ mengenai analisis sistem

¹⁰¹ V. Wiratna Sujarweni, *Sistem Akuntansi...* Hal. 127.

¹⁰² James A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Hal. 192-193.

¹⁰³ Christina Kurnia Agatha dkk, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi atas Penggajian dan Pengupahan pada PT. Batik Arjuna Cemerlang Sukoharjo", *Jurnal Advance*, Vol. 5, No.2, Desember (2018): 7-19, Dalam <https://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/411/399>, Diakses pada tanggal 4 Januari 2022 Pukul 05.07 WIB, Hal 12-13.

informasi akuntansi atas penggajian dan pengupahan pada PT. Batik Arjuna Cemerlang Sukoharjo dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terjadi pemerangkapan fungsi atau jabatan terkait penggajian dan pengupahan serta pencatatan yang dilakukan masih secara manual belum terkomputerisasi.

Dokumen memiliki peran penting sebagai bukti transaksi berupa data keuangan yang bermanfaat dalam mengelola informasi keuangan. Dalam hal ini dokumen-dokumen yang digunakan pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung terkait penerapan sistem informasi akuntansi pengupahan berupa daftar upah dan amplop upah yang dicatat secara manual dan belum tercetak nomor bukti dan sederhana serta belum memiliki salinan yang dapat digunakan sebagai arsip. Permasalahan timbul dikarenakan terjadinya kesalahan pembayaran upah lantaran besaran upah yang diterima tidak sesuai dengan jumlah setoran produk yang telah diselesaikan. Karyawan tenaga kerja lepas hanya diberi amplop upah yang berisikan pembayaran upah tanpa mengetahui rincian perhitungannya, sehingga terkadang timbul ketidaksesuaian antara tenaga kerja lepas dengan perhitungan oleh bagian gaji dan upah. Oleh sebab itu, perlu dibuatkan dibuatkan surat pernyataan upah yang berisikan rincian upah yang diterima karyawan setiap kali melakukan pembayaran upah. Hal ini sependapat dengan teori menurut Mulyadi, bahwa dokumen surat pernyataan upah

menyajikan rincian perhitungan upah yang diterima karyawan sebagai tandak bukti pembayaran upah.¹⁰⁴

Hasil penelitian ini secara konsisten mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Langi dkk¹⁰⁵, mengenai analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya pengendalian internal PT. Gemilang Emas Indonesia yang menunjukkan bahwa dalam penerapannya belum memiliki dokumen-dokumen yang memadai sehingga menimbulkan pengendalian internal kurang efektif. Selain itu juga terjadi pemerangkapan tugas oleh fungsi atau karyawan yang ditunjuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama.

Sementara itu, pencatatan akuntansi menurut teori yang dikemukakan oleh Mulyadi terdiri dari jurnal umum, kartu harga pokok produk, kartu biaya, kartu penghasilan karyawan.¹⁰⁶ Pada praktiknya pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung melakukan catatan jurnal umum untuk mencatat pengeluaran kas yang digunakan untuk pengupahan oleh bagian keuangan. Dikarenakan perusahaan masih melakukan pencatatan yang sederhana dan manual, pencatatan daftar upah disesuaikan dengan setoran yang diselesaikan yang dicatat setiap karyawan melakukan penyetoran.

¹⁰⁴ Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi 4,...*, Hal 313.

¹⁰⁵ Brenda Langi, dkk, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Dalam Upaya Pengendalian Internal Pada PT. Gemilang Emas Indonesia" *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 14, No. 1, April (2019), Dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/22324>, Diakses pada Tanggal 4 Januari 2022 Pukul 05.00 WIB. Hal.151-152.

¹⁰⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi 4...* Hal. 317.

Menurut teori Mulyadi, terdapat prosedur-prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi pengupahan sebagai berikut, prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur dsitribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran upah.¹⁰⁷

Akan tetapi pada praktiknya jaringan aliran prosedur yang dijalankan pada perusahaan industri batik tersebut dijalankan dengan baik meskipun belum sepenuhnya dijalankan secara lebih rinci seperti pada teori. Sebagaimana prosedur yang dijalankan, yaitu prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, dan prosedur pembayaran upah. Pengerjaan produk oleh karyawan tenaga kerja lepas ini dikerjakan di rumah masing-masing karyawan, sehingga tidak menggunakan prosedur pencatatan waktu hadir dan prosedur pencatatan waktu kerja melainkan jika produk sudah selesai langsung disetorkan ke CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung. Prosedur dijalankan oleh dua fungsi bagian, yaitu oleh bagian gaji dan upah dan bagian keuangan. Prosedur pengupahan karyawan dimulai dengan karyawan yang menyetorkan satuan produk yang telah diselesaikan kepada bagian gaji dan upah untuk dilakukan pencatatan pada daftar upah karyawan yang dicatat secara sederhana dan manual. Kemudian daftar upah diserahkan kepada bagian keuangan untuk

¹⁰⁷ Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi 4*,...Hal.321-320.

memperoleh biaya pengupahan karyawan dan selanjutnya di masukkan ke amplop upah dan dibayarkan langsung kepada karyawan.

C. Penerapan Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung

1. Lingkungan pengendalian

CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung dalam penerapan standar operasional prosedur belum sepenuhnya diterapkan dengan baik seperti absensi karyawan yang masih sederhana dan tidak rutin dicatat per hari dengan jelas. Kejelasan tujuan perusahaan diwujudkan melalui visi, misi, dan motto perusahaan. Dalam menciptakan lingkungan pengendalian juga didukung oleh adanya struktur organisasi yang jelas sebagaimana yang telah dibentuk pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung. Namun, masih terjadi rangkap jabatan dan kurang dalam melakukan pengawasan atau evaluasi.

2. Penilaian resiko

Sebuah sistem yang diterapkan tidak terlepas dari risiko yang terjadi. Pada penerapan sistem akuntansi penggajian masih rentan terjadi kesalahan pembayaran gaji dikarenakan ketidakakuratan data absensi yang digunakan sehingga memicu terjadinya kelebihan pembayaran ataupun kekurangan. Evaluasi perusahaan dilakukan jika ada salah satu karyawan yang melaporkan bahwa terjadi kesalahan pada pembayaran gajinya. Oleh sebab itu, masih perlu adanya pengawasan dan

pemeriksaan yang rutin terkait dengan data absensi karyawan perusahaan dan perlu untuk pembuatan dokumen yang memadai dengan jelas.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian yang dilakukan pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulunggaung belum sepenuhnya diterapkan dengan baik sebagaimana mestinya. Lantaran masih terjadi rangkap jabatan karena pemisahan tugas tanggungjawab yang belum dilakukan. Catatan dan dokumen-dokumen yang digunakan masih secara manual belum tercetak dan belum memiliki nomor bukti melainkan hanya tercantum nama dan tanggal saja dengan penggunaan dokumen berupa daftar gaji dan upah, jurnal umum, dan absensi karyawan. Penyimpanan dokumen penggajian dan pengupahan masih rentan terjadi kehilangan, karena belum memiliki arsip jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan masih belum dilaksanakan secara rutin. Guna memastikan perhitungan gaji dan upah sesuai dengan perhitungannya, maka peneliti memberikan rekomendasi dokumen terkait surat pernyataan gaji dan upah karyawan.

4. Informasi dan Komunikasi

Sehubungan dengan upaya memberikan kelancaran dan kejelasan salah satunya perlu komunikasi secara jelas gal ini tentunya juga sudah diberlakukan pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung dilakukan oleh seluruh karyawan dengan adanya

koordinasi yang baik apabila terjadi ketidakcocokan. Misalnya terkait dengan jalanya pembayaran imbalan yang dilakukan sebagai hak tenaga kerja. Apabila terjadi kesalahan pembayaran langsung dikomunikasikan antara bagian gaji dan upah dengan karyawan yang bersangkutan.

5. Pemantauan atau pengawasan

Pengawasan pada CV. Saha Perkasa Gajah Mada kabupaten Tulungagung dilakukan oleh pemilik dan pada bagian penggajian dan pengupahan dilaksanakan oleh fungsi bagian gaji dan upah. Akan tetapi, dalam pengawasannya masih belum rutin dikarenakan fokus tanggungjawab bagian gaji dan upah juga harus terbagi untuk memonitoring pada bagian produksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penerapan pengendalian interal yang dilakukan atas sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai teori yang dikemukakan oleh COSO dan secara keseluruhan masih belum dapat mendukung peningkatan pengendalian internal. Dikarenakan masih terdapat beberapa unsur yang belum terpenuhi, seperti masih terjadi rangkap tugas, catatan yang masih sederhana, dokumen yang belum memadai sehingga menimbulkan kesalahan pembayaran gaji maupun upah. Meskipun sistem atau prosedur yang terkait dengan penggajian dan pengupahan saat ini masih bisa tetap berjalan, akan tetapi menjadi lebih baik apabila mampu menerapkan sistem yang dapat mendukung pengendalian internal perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan maupun risiko yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan tugas supaya fungsi yang bertanggungjawab dapat bisa lebih fokus dan memaksimalkan tanggungjawab dengan baik yang didukung pula dengan dokumen-dokumen dan catatan yang memadai. Selain itu, juga perlu adanya pengawasan secara rutin terhadap jalannya kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan pada kinerja keseluruhan sehingga jika diketahui ada kekurangan maupun kesalahan bisa segera dilakukan perbaikan maupun evaluasi.

Kemudian hasil penelitian ini secara konsisten mendukung penelitian yang dilakukan oleh Langi, dkk,¹⁰⁸ mengenai analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya pengendalian internal PT. Gemilang Emas Indonesia. Dimana hasil penelitian menyajikan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan masih terdapat kekurangan, karena belum dijalankan sesuai dengan praktik yang sehat yang ditandai dengan rangkap jabatan dan belum melakukan pemisahan tugas. Meskipun struktur organisasi telah dibuat dengan jelas, akan tetapi pada praktiknya masih belum sejalan dengan kebijakan yang diatur.

Hasil penelitian tersebut juga mendukung penelitian terdahulu oleh Aprilliadi,¹⁰⁹ mengenai analisis sistem informasi akuntansi penggajian dan

¹⁰⁸ Brenda Langi, dkk, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Dalam Upaya Pengendalian Internal Pada PT. Gemilang Emas Indonesia" *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 14, No. 1, April (2019), Dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/22324>, Diakses pada Tanggal 4 Januari 2022 Pukul 05.00 WIB. Hal.151-152.

¹⁰⁹ Teddy Aprilliadi, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan dalam Upaya Pengendalian Internal pada Karyawan Outsourcing", *Jurnal Pendidikan Berkarakter*, Vol. 2, No.1,

pengupahan dalam upaya pengendalian intern karyawan outsourcing PT. Semen Indonesia Packing Plant Ciwadan, yang menunjukkan terdapat kekurangan guna mendukung unsur pengendalian internal lantaran miah belum melakukan pemisahan tugas pada fungsi-fungsi yang terkait, belum melakukan catatan yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang baik dan benar serta belum melaksanakan praktik yang sehat dikarenakan hasil absensi karyawan belum dilakukan pengawasan secara rutin.